

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Pembangunan konstruksi merupakan hal yang wajib dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur tersebut memiliki dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, berwujud maupun tidak berwujud. Beberapa penelitian terkait dengan nilai-nilai publik yang merupakan dampak dari pembangunan infrastruktur telah banyak dilakukan di beberapa daerah, adapun penelitian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama dilakukan oleh Prabantoro (2013) tentang Mengukur Kelayakan Ekonomis Proyek Sistem Informasi Manajemen Menggunakan Metode '*Cost & Benefits Analysis*' Dan Aplikasinya Dengan MS EXCEL 2000 menyatakan bahwa hasil perhitungan yang didapat dari '*Cost & Benefits Analysis*' dengan menggunakan alat-alat analisis financial seperti Payback Period, NPV, ROI dan IRR dapat dimanfaatkan dalam membantu mengambil keputusan dalam menetapkan kelayakan secara ekonomis sebuah Proyek Pengembangan Sistem Informasi Manajemen.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Purwaningsih (2012) yang berjudul Analisis Biaya Manfaat Sosial Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Gedebage Bagi Masyarakat Sekitar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatasi masalah sampah yang semakin meningkat, ketiadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), dan keterbatasan lahan sebagai lahan TPA di Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung. Temuan dalam penelitian ini adalah untuk masyarakat yang berada di sekitar PLTSa, Gedebage, dimana PLTSa Gedebage (incinerator) dibangun dari tahun 2011 hingga batas waktu berakhir pada tahun 2032, lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada positifnya. Secara ekonomi, PLTSa Gedebage dengan teknologi pirolisis akan lebih menguntungkan ketika dilihat dari lingkungan. PLTSa Gedebage dengan teknologi gasifikasi menjadi pilihan yang lebih baik.

Kemudian penelitian oleh Istari (2014) yang berjudul Analisis Biaya Manfaat Proyek Pembangunan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Terhadap Peningkatan Pengembangan Ekonomi Lokal (Proyek Kasus Ds.Sidomulyo, Kec.Purwoasri, Kediri). Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengidentifikasi kelayakan proyek pembangunan melalui PNPM MP yaitu proyek pembangunan saluran irigasi tersier. Metode yang digunakan dengan membandingkan baik manfaat dan biaya sebelum dan sesudah proyek dengan menggunakan *Benefit Cost Analysis* (BCA) atau Analisis Biaya Manfaat. Temuan dari penelitian ini yaitu bahwa proyek pembangunan saluran irigasi tersier memiliki tingkat kelayakan yang cukup tinggi (high feasible). Hal ini disebabkan perolehan pv

benefit lebih besar jika dibandingkan dengan pv cost. Selain itu, hasil NPV, IRR, dan B/C ratio yang besar menunjukkan proyek saluran irigasi tersier diterima.

Selanjutnya penelitian oleh Aryansah dan Indryani (2012) yang berjudul Analisa Manfaat Dan Biaya Rusunawa Jemundo, Sidoarjo. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan mengakibatkan lahan untuk pemukiman semakin mahal. Temuan dari penelitiannya menunjukkan bahwa analisa yang diperoleh dari hasil penelitian manfaat sebesar 3.326 dan penilaian biaya sebesar 2.785. Dari hasil perbandingan manfaat biaya diperoleh hasil sebesar 1.19, sehingga proyek layak dilaksanakan.

Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Fernando dan Chandra (2011) yang berjudul Analisis Biaya Dan Manfaat Penggunaan Sistem Pengolahan Transaksi Pada Pt. Jaya Beton Perkasa Palembang bertujuan untuk menganalisa keuntungan dari sisi biaya dan manfaat terhadap Sistem Pengolahan Transaksi yang akan digunakan oleh PT. Jaya Beton Perkasa. Hasil dari penelitian tersebut adalah Sistem Pengolahan Transaksi yang akan digunakan oleh perusahaan ini akan memberikan keuntungan dari sisi manfaat yaitu, proses bisnis yang lebih cepat, dalam hal ini proses pembelian dan pengecekan bahan baku, dan juga keuntungan dari sisi penghematan biaya operasional yang cukup tinggi.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2014) tentang Analisis Biaya-Manfaat Pada Proyek Peningkatan Ruas Jalan Provinsi Studi Kasus : Ruas Jalan Wonosari-Semin Kabupaten Gunungkidul. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau

apakah biaya yang dikeluarkan untuk peningkatan ruas jalan Wonosari-Semin tersebut sebanding dengan manfaat yang diperoleh bagi pengguna jalan selama umur rencana. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengevaluasi kinerja ruas jalan WonosariSemin, melakukan identifikasi dan menganalisa manfaat dari pekerjaan peningkatan jalan tersebut dengan menggunakan metode Benefit Cost Ratio (BCR). Penelitian pada pekerjaan peningkatan ruas jalan Wonosari-Semin dilakukan dalam beberapa tahap. Data yang dianalisis pada penelitian ini menggunakan data primer hasil survey di lapangan dan data sekunder yang didapat dari instansi yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai derajat kejenuhan pada ruas jalan Wonosari-Semin tidak melebihi 0,75 yaitu nilai yang dipersyaratkan didalam MKJI 1997 sehingga dapat dikatakan bahwa kepadatan pada ruas tesebut masih rendah dan tidak mengalami masalah dengan kapasitas. Nilai kelayakan yang dihitung dengan total manfaat berupa penghematan biaya operasional kendaraan dan penghematan nilai waktu dibandingkan dengan biaya investasi diperoleh hasil 3.84 sehingga peningkatan ruas jalan Wonosari-Semin tersebut layak dilaksanakan.

Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Friatno, dkk (2014) yang berjudul Analisis Biaya Dan Manfaat Usaha Wisata Terumbu Karang Taman Pendidikan Laut Bintang Samudera. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan wisata terumbu karang di Taman Pendidikan Laut Bintang Samudra (TPL BS), mengetahui besarnya manfaat yang diperoleh dari usaha wisata terumbu karang dan tingkat kelayakan dari usaha wisata

terumbu karang di TPL BS Kabuapten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkesinambungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total biaya (*total cost*) yang dikeluarkan dalam pengelolaan wisata terumbu karang di TPL BS sebesar Rp191.566.665,- Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari usaha wisata terumbu karang tersebut sebesar Rp313.433.335,- yang diperoleh dari hasil pengurangan total biaya dan total manfaat yang diperoleh dari usaha tersebut.

Tabel. 2.1 Tinjauan Penelitian

No	Nama	Judul	Kesimpulan/ Temuan
1	Gatot Prabantoro (2013)	Mengukur Kelayakan Ekonomis Proyek Sistem Informasi Manajemen Menggunakan Metode 'Cost & Benefits Analysis' Dan Aplikasinya Dengan MS EXCEL 2000	Temuan dari penelitian ini adalah hasil perhitungan yang didapat dari 'Cost & Benefits Analysis' dengan menggunakan alat-alat analisis financial seperti Payback Period, NPV, ROI dan IRR dapat dimanfaatkan dalam membantu mengambil keputusan dalam menetapkan kelayakan secara ekonomis sebuah Proyek Pengembangan Sistem Informasi Manajemen.
2	Murni Rahayu Purwaningsih (2012)	Analisis Biaya Manfaat Sosial Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Gedebage Bagi Masyarakat Sekitar	Temuan dalam penelitian ini adalah untuk masyarakat yang berada di sekitar PLTSa, Gedebage, dimana PLTSa Gedebage (incinerator) dibangun dari tahun 2011 hingga batas waktu berakhir pada tahun 2032, lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada

			positifnya. Secara ekonomi, PLTSa Gedebage dengan teknologi pirolisis akan lebih menguntungkan ketika dilihat dari lingkungan. PLTSa Gedebage dengan teknologi gasifikasi menjadi pilihan yang lebih baik.
3	Adhistya Cinta Dhama Istari (2014)	Analisis Biaya Manfaat Proyek Pembangunan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Terhadap Peningkatan Pengembangan Ekonomi Lokal (Proyek Kasus Ds.Sidomulyo, Kec.Purwoasri, Kediri)	Temuan dari penelitian ini yaitu bahwa proyek pembangunan saluran irigasi tersier memiliki tingkat kelayakan yang cukup tinggi (high feasible). Hal ini disebabkan perolehan pv benefit lebih besar jika dibandingkan dengan pv cost. Selain itu, hasil NPV, IRR, dan B/C ratio yang besar menunjukkan proyek saluran irigasi tersier diterima
4	Novan Dwi Aryansyah dan Retno Indryani (2012)	Analisa Manfaat Dan Biaya Rusunawa Jemundo, Sidoarjo	Temuan dari penelitian ini bahwa hasil analisa diperoleh hasil penelitian manfaat sebesar 3.326 dan penilaian biaya sebesar 2.785. Dari hasil perbandingan manfaat biaya diperoleh hasil sebesar 1.19, sehingga proyek layak dilaksanakan
5	Freddy Fernando dan Charlie Chandra (2011)	Analisis Biaya Dan Manfaat Penggunaan Sistem Pengolahan Transaksi Pada Pt. Jaya Beton Perkasa Palembang	Hasil dalam penelitian ini adalah Sistem Pengolahan Transaksi yang akan digunakan oleh perusahaan ini akan memberikan keuntungan dari sisi manfaat yaitu, proses bisnis yang lebih cepat, dalam hal ini proses pembelian dan pengecekan bahan baku, dan juga keuntungan dari sisi penghematan biaya operasional yang cukup tinggi

6	Yuli Nurwahyu Dewi (2014)	Asnalisis Biaya-Manfaat Pada Proyek Peningkatan Ruas Jalan Provinsi Studi Kasus: Ruas Jalan Wonosari-Semin Kabupaten Gunungkidul.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai derajat kejenuhan pada ruas jalan Wonosari-Semin tidak melebihi 0,75 yaitu nilai yang dipersyaratkan didalam MKJI 1997 sehingga dapat dikatakan bahwa kepadatan pada ruas tersebut masih rendah dan tidak mengalami masalah dengan kapasitas. Nilai kelayakan yang dihitung dengan total manfaat berupa penghematan biaya operasional kendaraan dan penghematan nilai waktu dibandingkan dengan biaya investasi diperoleh hasil 3.84 sehingga peningkatan ruas jalan Wonosari-Semin tersebut layak dilaksanakan
7	Aldiansyah Hari Friatno, Baru Sadarun dan Nurdiana A (2014)	Analisis Biaya Dan Manfaat Usaha Wisata Terumbu Karang Taman Pendidikan Laut Bintang Samudera	Hasil penelitian menunjukan bahwa total biaya (<i>total cost</i>) yang dikeluarkan dalam pengelolaan wisata terumbu karang di TPL BS sebesar Rp191.566.665,- Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari usaha wisata terumbu karang tersebut sebesar Rp313.433.335,- yang diperoleh dari hasil pengurangan total biaya dan total manfaat yang diperoleh dari usaha tersebut.

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini tentunya berbeda dengan beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas. Penelitian ini akan melihat kualitas belanja dari Pekerjaan konstruksi di DIY dan hasil (*outcome*) dari pekerjaan

konstruksi tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dan bermanfaat bagi masyarakat DIY.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 *Cost and Benefit Analysis* (Analisis Biaya dan Manfaat)

2.2.1.1 Pengertian *Cost and Benefit Analysis*

Analisis Biaya dan Manfaat atau *Cost and Benefit Analysis* (CBA) adalah alat yang digunakan untuk menentukan peringkat proyek atau untuk memilih pilihan yang paling tepat. Peringkat atau keputusan tersebut didasarkan pada biaya ekonomi dan manfaat yang diharapkan (Department of Environmental Affairs and Tourism: 2006).

Selain itu menurut Prasetya (2012) analisis biaya dan manfaat banyak digunakan untuk mengevaluasi penggunaan sumber-sumber ekonomi agar sumber yang langka tersebut dapat digunakan secara efisien dan oleh karena itu merupakan metode yang sangat penting untuk dipahami. Analisis manfaat dan biaya ini hanya menitikberatkan pada efisiensi penggunaan faktor produksi tanpa mempertimbangkan masalah lain seperti distribusi, stabilisasi ekonomi dan sebagainya.

Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Schniederjans et al dalam Christian (2013) *Cost-Benefit Analysis* adalah suatu teknik untuk menganalisis biaya dan manfaat yang melibatkan estimasi dan mengevaluasi dari

manfaat yang terkait dengan alternatif tindakan yang akan dilakukan. Teknik ini membandingkan nilai manfaat kini dengan investasi dari biaya investasi yang sama sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa analisa biaya manfaat adalah suatu cara untuk menghitung (dalam besaran nilai uang) sejauh mana biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mewujudkan suatu proyek tertentu memberikan hasil manfaat, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk dipilih atau tidak dalam suatu pengambilan keputusan

2.2.1.2 Ciri Khusus *Cost-Benefit Analysis (CBA)*

Adapun ciri khusus dari analisis biaya manfaat yaitu sebagai berikut:

- a. Analisis biaya manfaat berusaha mengukur semua biaya dan manfaat untuk masyarakat yang kemungkinan dihasilkan dari program publik, termasuk berbagai hal yang tidak terlihat yang tidak mudah untuk diukur biaya dan manfaatnya dalam bentuk uang.
- b. Analisis biaya dan manfaat secara tradisional melambangkan rasionalitas ekonomi, karena kriteria sebagian besar ditemukan dengan penggunaan efisiensi secara global. Suatu kebijakan atau program dikatakan efisien jika manfaat bersih (total manfaat dikurangi total biaya) adalah lebih besar dari nol dan lebih tinggi dari manfaat bersih

yang mungkin dapat dihasilkan dari sejumlah alternatif investasi lainnya di sektor swasta dan publik.

- c. Analisis biaya manfaat secara tradisional menggunakan pasar swasta sebagai titik tolak di dalam memberikan rekomendasi program publik.
- d. Analisis biaya manfaat kontemporer, sering disebut analisis biaya manfaat sosial, dapat juga digunakan untuk mengukur pendistribusian kembali manfaat

2.2.1.3 Komponen Biaya

Komponen yang diperlukan untuk menganalisis biaya/efektifitas yaitu:

- a. Komponen Biaya
- b. Komponen Efektivitas.

Biaya yang berhubungan dengan pembangunan konstruksi dapat diklasifikasikan ke dalam 4 katagori utama, yaitu :

- a. Biaya persiapan
- b. Biaya Investasi atau Modal
- c. Biaya Operasional
- d. Biaya Pembaruan atau Penggantian

Beberapa kategori utama tersebut berpengaruh pada efisiensi biaya terkait dengan para aktor yang mengadakan biaya berupa biaya perencanaan atau persiapan yang kemudian direalisasikan pada aktor pelaksana pengadaan biaya dalam bentuk biaya proyek atau biaya pengerjaan/proyek kemudian ditambahkan biaya perawatan serta operasi lanjutan.

Efisiensi pembiayaan merupakan aktifitas yang berkaitan dengan pengendalian biaya yang berarti bahwa biaya yang dikeluarkan atau biaya target meliputi biaya pengadaan dan persiapan untuk direalisasikan dalam bentuk biaya proyek serta biaya operasi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aktiva tersebut. Hal ini berarti bahwa sebuah perusahaan terutama para pengembang atau kontraktor dituntut untuk memperhatikan masalah efisiensi biaya (Handoko, 2015).

Sedangkan menurut (Blocher, 2007) efisiensi merupakan kemampuan perusahaan untuk tidak membuang sumber pembiayaan yang melebihi jumlah diperlukan. Hal ini berarti bahwa pihak pembuat sumber pembiayaan harus menerapkan akuntabilitas dalam pengerjaan suatu usaha sehingga diharapkan jumlah biaya usaha tersebut tidak melebihi dari biaya sumber.

Berdasarkan pernyataan Blocher (2007) dan Handoko (2014) tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa efisiensi biaya merupakan suatu tolak ukur atau indikator keberhasilan dari suatu aktor pembuat atau perencana pembiayaan dimana dalam menjalankan usaha atau pengerjaan menimbulkan besaran biaya operasional yang sesuai atau kurang dari biaya perencanaan semula.

Merujuk pada pernyataan di atas, efisiensi biaya merupakan suatu tolak ukur atau indikator keberhasilan dari pembuat rencana biaya awal yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum ESDM DIY serta Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah untuk direalisasikan dalam biaya operasional pada pihak pelaksana proyek konstruksi *Fly over* Jombor, titik 0 km dan Perpustakaan Grahatama sehingga menghasilkan besaran biaya yang sesuai dengan biaya awal atau biaya persiapan dengan besaran biaya operasional atau biaya realisasi. Di satu sisi, biaya akan lebih efisien apabila terdapat selisih lebih antara besaran biaya yang sesuai dengan biaya awal atau biaya persiapan dengan besaran biaya operasional atau biaya realisasi.

2.2.2 Public Value Management (Nilai Manajemen Publik)

Konsep nilai publik dapat dijelaskan sebagai struktur yang multidimensi, sebagai refleksi dari ekspresi kolektif, yang diciptakan tidak hanya melalui hasil, tetapi juga melalui proses yang dapat menghasilkan kepercayaan dan kesetaraan. Nilai publik adalah tantangan yang signifikan bagi administrasi publik, dan para akademisi yang akan membuat progres signifikan untuk mengeksplor maksud, penyelesaian dan tantangan tersebut (Bozeman, *et al* dalam Yang (2016)). Selain itu Moore dalam *Todoruț dan Tselentis (2015)* mendefinisikan “nilai publik” sebagai kerangka kerja yang membantu kita terhubung dengan apa yang kita percaya adalah

sesuatu yang berharga dan membutuhkan sumber daya publik bersama-sama dengan cara-cara untuk meningkatkan pemahaman tentang “nilai publik”.

Di dalam paradigma nilai publik (*public value*) lebih mudah diterima bahwa aktivitas pemerintah saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain dan dengan demikian mungkin akan memerlukan lebih banyak upaya untuk kolaborasi dalam mengejar nilai-nilai publik O’Flynn (2007). Misalnya, secara eksplisit berusaha untuk menghubungkan manajemen nilai publik dengan bentuk jaringan pemerintahan, ia berpendapat bahwa manajer publik harus dapat 'mengelola melalui jaringan, belajar secara terbuka dengan cara yang berbeda dan untuk menarik sumber daya dari berbagai sumber Stoker dalam O’Flynn (2007).

Mengarah pada nilai publik adalah ciri dari munculnya paradigma management baru (*New Public Management*). Berbeda dengan administrasi publik tradisional, manajemen publik baru tidak berusaha untuk membatasi politik melainkan melihatnya sebagai pusat tantangan manajemen. Asal-usulnya terdapat pada bagian yang diperoleh melalui karya penulis praktisi yang berorientasi pada manajemen yang bersangkutan dengan pejabat untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih efektif dengan politisi dan mengembangkan rasa dimensi non-bisnis yang khas untuk mempertimbangkan pelayanan publik yang harus dijalankan, hal ini diungkapkan oleh Goss, et al dalam Stoker (2006).

Nilai publik adalah tantangan yang signifikan bagi administrasi publik, dan para akademisi yang akan membuat progres signifikan untuk mengeksplor maksud, penyelesaian dan tantangan tersebut (Bozeman, *et al* dalam Yang (2016.)). Di dalam

paradigma nilai publik (*public value*) lebih mudah diterima bahwa aktivitas pemerintah saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain dan dengan demikian mungkin akan memerlukan lebih banyak upaya untuk kolaborasi dalam mengejar nilai-nilai publik O'Flynn (2007). Misalnya, secara eksplisit berusaha untuk menghubungkan manajemen nilai publik dengan bentuk jaringan pemerintahan, ia berpendapat bahwa manajer publik harus dapat 'mengelola melalui jaringan, belajar secara terbuka dengan cara yang berbeda dan untuk menarik sumber daya dari berbagai sumber (Stoker dalam O'Flynn (2007)).

Untuk para pendukung nilai manajemen publik, ada kepercayaan yang kuat bahwa wilayah publik berbeda dengan sektor komersial, yang merupakan sesuatu yang termasuk dalam perspektif administrasi publik tradisional. Pemerintahan dalam hal ini tidak sama dengan berbelanja atau yang lebih luas membeli dan menjual barang secara ekonomi seperti di pasar. Akibatnya, beberapa cara yang dilakukan oleh *New Public Management* (NPM) diambil dari pengalaman swasta yang mungkin tidak sesuai. Dari semua hal itu, didalam model *public value* (nilai publik), politik tidak hanya dibatasi pada beberapa ruang tertentu, dan karakteristik ini membuat perbedaan yang cukup besar dari dua paradigma yang lain. Paradigma tradisional dan paradigma management baru (*New Public Management*) berusaha untuk membatasi peran politik kedalam sistem management dan keputusan akhir. Ketika politik terbebas dari tugas-tugas ini dan berpindah kebidang lain hal inidilihat sebagai kegagalan. Tetapi, didalam paradigmanilai publik, politik adalah

sebuah proses yang mewarnai kehidupan dari seluruh proses. Politik bagaimanapun juga dipandang lebih luas dari partai politik (Stoker: 2006).

Lebih lanjut Stoker (2006) juga menjelaskan bahwa ada tiga alasan mengapa politik dinilai sebagai mekanisme untuk koordinasi sosial. Pertama, memungkinkan orang untuk bekerja sama dan membuat pilihan atas dasar sesuatu yang melebihi individualisme pasar. Memperlakukan orang dan mendorong mereka untuk memperlakukan orang lain dengan pengakuan secara utuh dari kualitas sumber daya manusia dan pengalaman mereka. Kedua, pengambilan keputusan politik bersifat fleksibel, oleh karena itu, dapat menangani ketidakpastian, ambiguitas, dan perubahan secara tidak terduga. Politik merupakan mekanisme penting dalam mengatasi dunia yang tidak pasti dan tidak terduga. Ketiga, politik dapat bergerak melampaui manfaat distribusi, fungsi pendistribusian juga ditawarkan oleh pasar untuk menyusun sebuah proses produksi sosial dimana kepentingan dibuat untuk tujuan bersama. Politik dapat mempengaruhi basis untuk kerjasama adalah sesuatu yang mungkin, yaitu dilakukan dengan cara mengubah preferensi masyarakat dan menciptakan lingkungan kerjasama.

Dari semua hal diatas Stoker (2006) menjelaskan bahwa apa yang diharapkan nilai manajemen publik adalah untuk pendekatan relasional dalam pelayanan barang dan jasa. Hal itu seharusnya tidak menjadi perbedaan yang besar antara klien dan kontraktor, keduanya harus melihat satu sama lain sebagai mitra untuk memelihara hubungan dalam jangka panjang dan seharusnya tidak terfokus pada kontrak apapun. Apakah yang menjadi tanda pendekatan dari *New Public Management*

(NPM) adalah etika pelayanan publik yang dilihat sebagai sistem yang sangat penting tidak ada spesifikasi etika sektor publik, tetapi etos pelayanan publik. Aldridge dan Stoker (2002) mengidentifikasi lima elemen dari etos paradigma *New Public Management* (NPM) yang seharusnya diadopsi oleh semua penyedia pelayanan publik yaitu:

- a. Budaya Kinerja. Sebuah komitmen yang kuat untuk melayani kepada individu dan sekelompok masyarakat yang mencerminkan pelayanan kelas dunia dan diperkuat dengan pelatihan, dukungan dan sistem untuk memastikan budaya pelayanan yang berkelanjutan dan perbaikan terus-menerus.
- b. Komitmen Akuntabilitas. Penekanan pada akses terbuka terhadap informasi bagi individu dan kelompok masyarakat yang tertarik dengan kekuatan akuntabilitas publik untuk pemilihan umum.
- c. Kapasitas untuk mendukung akses secara menyeluruh. Pengakuan dari pemeberian tanggungjawab secara khusus untuk mendukung semua hak pengguna layanan didalam lingkungan dimana mereka memilih pelayanan secara terbatas.
- d. Pertanggungjawaban praktek kerja. Terlatih, dikelola dengan baik, dan motivasi yang bagus dari anggota staf yang bertindak secara profesional dan penghargaan yang setimpal dengan hasil kerjanya.
- e. Kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat. Pengakuan terhadap kebutuhan dalam kelompok dengan yang lainnya di dalam sektor publik, swasta dan

sukarela untuk berkontribusi untuk mempromosikan kesejahteraan komunitas dan untuk memenuhi kebutuhan individu.

Selain itu, Moore dalam Yang (2016) menjelaskan bahwa nilai-nilai publik mengacu pada hasil yang diinginkan berkaitan dengan kualitas hidup individu dan kolektif bagi warga Negara, dan mereka dipengaruhi oleh apa yang Bozeman pertimbangkan dari konsensus normatif masyarakat yaitu:

- a. Hak dan manfaat dan hak istimewa untuk warga Negara yang seharusnya (tidak seharusnya) dimiliki,
- b. Kewajiban warga Negara untuk bermasyarakat, bernegara satu sama lain,
Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus/wajib dilakukan oleh setiap individu/ kelompok masyarakat. Sebagai warga negara hal-hal yang harus dilakukan dalam memenuhi kewajibannya diantaranya adalah:
 - 1) Saling menghormati satu sama lain
 - 2) Mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah
 - 3) Ikut serta dalam pemeliharaan fasilitas public
- c. Prinsip-prinsip yang harus di patuhi dalam membuat kebijakan pemerintah.
Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. (Suandi:

2010). Adapun implikasi kebijakan publik berdasarkan pengertian tersebut yaitu:

- 1) Kebijakan publik berbentuk pilihan tindakan-tindakan pemerintah;
- 2) Tindakan-tindakan pemerintah dialokasikan kepada seluruh masyarakat sehingga bersifat mengikat
- 3) Tindakan-tindakan pemerintah mempunyai tujuan-tujuan tertentu;
- 4) Tindakan-tindakan pemerintah selalu diorientasikan terhadap terpenuhinya kepentingan publik.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan kebijakan publik harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Adil yaitu tidak memihak siapapun
- b. Bersifat solutif
- c. Transparan, yaitu kebijakan publik dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Merujuk pada pernyataan Moore dalam Yang (2016) tersebut, hak manfaat merupakan hak yang semestinya diperoleh oleh publik dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraannya terkait dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan sedangkan hak istimewa merupakan hak bagi publik sebagai dampak dari kinerja pemerintah tersebut. Sehingga dalam rangka mewujudkan hak manfaat serta istimewa bagi publik, pemerintah memiliki

kewajiban untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, bernegara satu sama lain. Pemerintah dalam rangka mewujudkan kewajibannya tersebut, harus mematuhi beberapa prinsip pada saat membuat kebijakan terutama kebijakan dalam menciptakan pembangunan konstruksi yang berkaitan dengan kebutuhan transportasi publik dan kebutuhan pendidikan.

Pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan konstruksi terkait dengan kebutuhan publik akan transportasi juga harus memperhatikan prinsip penurunan kemacetan yang berhubungan dengan penurunan biaya kemacetan sebagaimana yang dinyatakan oleh Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) tahun 1997 bahwa kemacetan merupakan suatu kondisi dimana arus lalu lintas yang lewat pada ruas jalan setelah melalui proses peninjauan tercatat terdapat kelebihan kapasitas pada rencana jalan sehingga mengakibatkan kecepatan bebas ruas jalan mendekati atau melebihi 0 km/jam sehingga menyebabkan terjadinya antrian dengan nilai derajat kejenuhan lebih dari 0,5. Apabila pemerintah kurang memperhatikan hal tersebut, maka akan menimbulkan kenaikan biaya kemacetan sebagaimana yang dinyatakan oleh Hayati, Wicaksono, dan Sutikno (2013) bahwa biaya kemacetan merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan parameter yakni kecepatan eksisting dan ideal, biaya operasional kendaraan, nilai dan waktu perjalanan dan antrian kendaraan.

Merujuk pada pernyataan oleh MKJI (1997) dan Hayati, Wicaksono, dan Sutikno (2013), pemerintah DIY dalam menyelenggarakan konstruksi titik 0 km dan *fly over* Jombor seharusnya mendasarkan pada kepentingan publik yakni

menurunkan tingkat kemacetan yang akan berimbang pada penurunan biaya kemacetan sehingga memenuhi tujuan dalam manfaat bagi publik sebagai dampak dari pembangunan konstruksi titik 0 km dan *fly over* Jombor tersebut.

Pemerintah DIY dalam menyelenggarakan pembangunan konstruksi terkait dengan kebutuhan publik akan transportasi juga harus memperhatikan dampak secara fisik bagi lingkungan sekitar konstruksi yakni tingkat polusi. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1407 tahun 2002 tentang Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran Udara dimana pencemaran udara merupakan proses keluar dan masuknya suatu zat, energi, serta komponen lain ke dalam udara sebagai akibat dari kegiatan manusia sehingga menyebabkan kualitas udara tersebut menurun hingga ke tingkat tertentu dan mempengaruhi kesehatan manusia. Hal tersebut secara tidak langsung akan menciptakan biaya polusi yakni besaran biaya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan unsur-unsur nilai polutan berdasarkan jenis kendaraan dengan menggunakan metode Litmann (Hayati, Wicaksono, dan Sutikno, 2013).

Terkait dengan hal tersebut, pemerintah DIY dalam menyelenggarakan pembangunan konstruksi *fly over* Jombor dan titik 0 km untuk kepentingan publik seharusnya mengacu pada penurunan tingkat polusi dan biaya polusinya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pengguna hasil konstruksi tersebut terkait dengan kualitas kesehatannya. Di satu sisi, pembangunan konstruksi *fly over* Jombor dan titik 0 km yang diselenggarakan oleh pemerintah DIY juga tidak terlepas dari wewenang dalam meningkatkan kelayakan sanitasi sebagai pendukung

dari kelangsungan pembangunan konstruksi tersebut dimana menurut World Health Organization (WHO) sanitasi merupakan suatu usaha oleh badan usaha dalam mengawasi faktor lingkungan fisik yang mempengaruhi kehidupan manusia yang berkaitan dengan efek dari kerusakan perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup (Yulia; 2015).

Merujuk pada pernyataan WHO tersebut, pemerintah DIY pada saat menyelenggarakan pembangunan konstruksi *fly over* Jombor dan titik 0 km untuk lebih memperhatikan kesejahteraan publik terkait dengan kondisi fisik terutama kesehatan para pemakai jalan dengan meningkatkan kelayakan sanitasi di sekitar area konstruksi. Di satu sisi, dalam mewujudkan sanitasi yang layak bagi publik, pemerintah wajib mengeluarkan biaya operasional dalam membuat sanitasi yang memenuhi kelayakannya dimana biaya sanitasi merupakan keseluruhan biaya yang dipergunakan dalam mengukur ketidakpastian seperti limbah buangan melalui proses, sistem, dan fasilitas penting yang bertujuan dalam mengambil keputusan sesuai dengan sasaran. Biaya sanitasi yang telah disusun oleh pemerintah DIY tersebut diharapkan dapat meningkatkan pembangunan sanitasi yang layak bagi publik.

Konstruksi merupakan suatu bentuk bangunan yang meliputi beberapa unsur secara sinergis dan sistematis yang bertujuan untuk menjaga keutuhan bentuk bangunan tersebut sehingga menjadi kuat dan atau tidak berubah bentuknya dalam rangka mewujudkan keamanan bagi publik. Sedangkan fungsi dari konstruksi

tersebut adalah untuk menahan berbagai macam gaya yang menimpa pada bangunan tersebut sehingga tidak mempengaruhi strukturnya.

Pemerintah dalam rangka menciptakan konstruksi yang sesuai dengan harapan publik harus bekerjasama dengan pelaksana pembangunan konstruksi dimana beberapa hal di bawah ini harus menjadi perhatiannya pada saat membangun konstruksi berdasarkan aspek pokok berupa keseimbangan yakni :

- a. Struktur dinding sebagai *screen wall* atau pembatas ruang yang dindingnya menggunakan konstruksi dinding bata setengah batu dengan tebal dinding 15 cm. Konstruksi ini adalah syarat yang harus diperhatikan dalam pembangunan kebutuhan transportasi.
- b. Struktur rangka bangunan yang sifatnya permanen, maka konstruksinya harus bersifat tetap dan kuat dengan melibatkan material berupa baja dan beton yang kuat. Konstruksi ini juga syarat utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan kebutuhan transportasi.
- c. Bentuk struktur dari atap pelana, perisai, atau tenda adalah segitiga, maka dari itu diperlukan konstruksi kerangka atap yang disebut dengan kuda-kuda sebagai penopang beban atap. Konstruksi ini merupakan syarat yang harus diperhatikan dalam pembangunan perpustakaan (Hartiningsih ;2016).

Pemerintah dalam rangka menciptakan konstruksi yang sesuai dengan harapan publik juga harus memperhatikan aspek akuntabilitas dimana akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan

keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bagi publik sehingga akuntabilitas tersebut merupakan suatu akuntabilitas publik.

Akuntabilitas publik merupakan suatu kemampuan menjawab kepada seseorang atau kelompok terkait dengan kinerja yang diharapkan dengan memperhatikan beberapa prinsip seperti yang dinyatakan oleh Handoko (2007) yakni:

- a. Prinsip dasar operasi yaitu melakukan tugas yang didalam pelaksanaannya terdapat peraturan dan prosedur yang sah seperti Undang-Undang Dasar, keabsahan atau menurut Undang-Undang, peraturan dan prosedur administratif.
- b. Akuntabilitas internal kepada badan-badan dan pimpinan-pimpinan pejabat hierarki sekaligus berdasarkan pula pada banyaknya pengawasan dan pengaturan.
- c. Akuntabilitas eksternal oleh masyarakat sebagai subjek dan pelaku
- d. Pengadilan tentang keadilan kepada publik.
- e. Unsur pokok meliputi bentuk dan prosedur yang diikuti dengan tindakan administratif
- f. Kriteria formal yakni pelaksanaan prosedur dan aturan yang pasti
- g. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal secara administratif dan pengadilan berdasarkan hukum formal, peraturan-peraturan dan juga bersumber dari masyarakat.

- h. Konsekuensi berupa sanksi dan penghargaan atas pengaruh aparatur pemerintah serta ganti rugi kepada masyarakat dan konsekuensi administratif meliputi perbaikan atas tindakan administratif, ganti rugi, sanksi atau penghargaan kepada pejabat publik yang berpengaruh.
- i. Pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah DIY dalam rangka melaksanakan pembangunan *Fly over* Jombor, titik 0 km dan Perpustakaan Grahatama untuk memenuhi manfaat publik harus memperhatikan beberapa hal seperti prinsip akuntabilitas, konstruksi serta pengadaan barang dan jasa sehingga hasil dari pembangunan konstruksi tersebut benar-benar dirasakan oleh publik dalam menumbuhkan kesejahteraan dan keadilan.

2.2.3 Islamic Public Value (Nilai Publik dalam Perspektif Islam)

Menurut Moore dalam Sheila (2013) nilai publik diartikan sebagai sebuah pemikiran dan tindakan strategis oleh para pembuat kebijakan publik dan manajer, dalam menghadapi kompleksitas dan penghematan atau sebuah sarana populer untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

Konsep nilai publik dalam Islam didasarkan pada Al-qur'an dan As-Sunnah, dimana untuk mengetahui indikator atau nilai-nilai publik dalam Islam diturunkan

dari konsep negara. Dalam istilah islam Negara disebut sebagai *al-balad* yang artinya adalah tempat, kota, daerah dan negeri. Kemudian Al- mawardi (2015) menyebutkan unsur-unsur negara dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat adalah sebuah kondisi yang memperlihatkan tentang kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin: 2012). Badan Pusat Statistik menggunakan IPM untuk mengukur capaian pembangunan manusia dengan menggunakan tiga dimensi dasar, yaitu mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan serta kehidupan yang layak. Ketiga dimensi dasar tersebut menggambarkan empat komponen dasar kualitas hidup yakni angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan; angka melek huruf dan rata-rata lama bersekolah untuk mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok hidup masyarakat yang dapat dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup yang layak (Hukom: 2016).

b. Keadilan yang menyeluruh

Keadilan adalah menjadikan dua benda itu sama dan juga meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adapun Prinsip keadilan menurut Rama dan Makhlani (2014) apabila dikaitkan dengan demokrasi Islam, dilihat dari fungsi kekuasaan negara, yaitu: (1) kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan adil, jujur dan bijaksana. Semua rakyat harus dapat memperoleh hak-haknya secara adil tanpa suatu diskriminasi. (2) kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya. (3) kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Hal ini berkaitan dengan keadilan sejahtera.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam konteks ini keadilan merupakan hak dari warga negara, dimana unsur-unsur keadilan diantaranya yaitu:

- 1) Adanya partisipasi dari masyarakat
- 2) Sesuai dengan kebutuhan
- 3) Akses menyeluruh, dimana seluruh masyarakat dapat mengakses pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

c. Keamanan yang merata

Keamanan dalam hal ini adalah terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan. Sehubungan dengan hal di atas, menurut Carlson dan Schwartz dalam Denhardt (2003) menyatakan bahwa ukuran komprehensif untuk *servqual* sektor publik antara lain (1) *Security* (keamanan) yaitu ukuran tingkat dimana pelayanan yang disediakan membuat masyarakat merasa aman dan yakin ketika menerimanya. Selain itu, dalam pelayanan prima seperti yang dikutip Warella (1997) menyebutkan bahwa untuk menilai pelayanan publik yang berkualitas dapat digunakan kriteria keamanan yaitu proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat (Arisman: 2012).

Berdasarkan beberapa penjabaran di atas, nilai-nilai publik yang tercantum *Public Value Managment* dan *Islamic Public Value* memiliki persamaan dalam tujuan kebijakan instansi bagi publik dimana nilai hak manfaat dan istimewa bagi warga negara yang seharusnya atau tidak seharusnya dimiliki bertujuan dalam memperoleh keamanan yang merata bagi masyarakat dalam menggunakan hasil pembangunan yang

diselenggarakan. Sedangkan nilai kewajiban warga negara untuk bermasyarakat, bernegara satu sama lain merupakan kebijakan instansi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat terkait dengan hasil pembangunan. Di satu sisi, nilai prinsip-prinsip yang harus di patuhi oleh suatu instansi dalam membuat kebijakan bertujuan untuk menciptakan keadilan yang menyeluruh bagi masyarakat sehubungan dengan pembangunan proyek yang diselenggarakan sehingga unsur-unsur nilai tersebut merupakan nilai kombinasi (*combination value*) publik yakni manfaat publik, kesejahteraan dan keadilan dalam pembangunan proyek konstruksi.

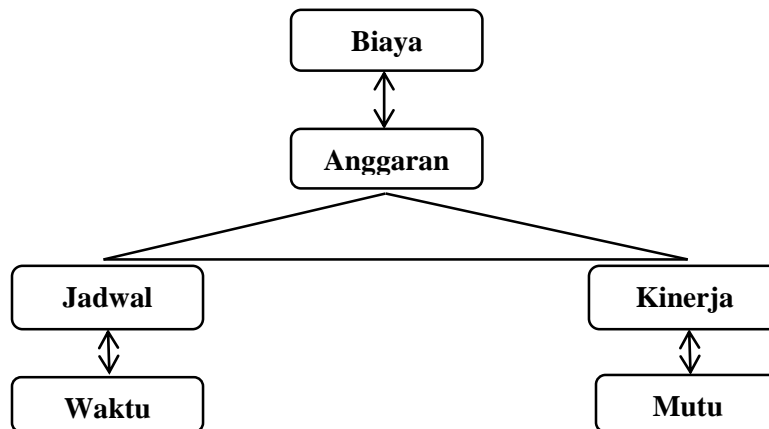
Pembangunan proyek konstruksi memiliki sasaran yang dituju. Sasaran adalah tujuan yang spesifik dimana semua kegiatan diarahkan dan diusahakan untuk mencapainya. Setiap proyek mempunyai tujuan yang berbeda, misalnya pembangunan perpustakaan, *flyover* dan jalan. Proses mencapai tujuan tersebut terdapat tiga sasaran pokok, yaitu besarnya biaya anggaran yang dialokasikan, jadwal kegiatan, dan mutu yang harus dipenuhi untuk mencapai suatu keberhasilan proyek. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikatan oleh Setiawan, dan Ariadi (2012) bahwa keberhasilan proyek ditentukan oleh beberapa indikator berikut:

- a. Waktu penyelesaian \leq waktu rencana

b. Biaya penyelesaian \leq biaya rencana

c. Mutu penyelesaian \geq mutu rencana

Gambar 2. 1 Hubungan antara Biaya, Waktu dan Kualitas Pekerjaan Konstruksi



Sumber: Soeharto dalam Tjusanto (2013)

Lebih lanjut Soeharto dalam Yudha (2012) menjelaskan tentang gambar 2.1 sebagai berikut:

a. Biaya

Proyek dikatakan berhasil jika proyek yang dilaksanakan dapat selesai tepat waktu, tepat guna, dan tepat biaya. Proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melebihi anggaran. Untuk proyek yang melibatkan dana dalam jumlah besar dan jadwal bertahun-tahun, anggarannya bukan ditentukan untuk total proyek, tetapi dipecahkan lagi kompinennya, atau periode tertentu yang

jumlahnya disesuaikan dengan keperluan. Dengan demikian penyelesaian bagian proyek juga harus memenuhi sasaran anggaran perperiode. Biaya akan meningkat apabila waktu pelaksanaan proyek dipercepat, tetapi biaya juga akan meningkat apabila waktu pelaksanaan proyek diperlambat.

b. Waktu

Proyek dikatakan berhasil apabila proses pengerjaannya sesuai dengan kurun waktu dan tanggal akhir yang telah ditentukan. Keterlambatan pelaksanaan proyek akan menimbulkan kerugian baik bagi pemilik maupun kontraktor, karena dampak keterlambatan adalah konflik dan perdebatan tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab, juga tuntutan waktu dan biaya tambah. Menurut Lewis dan Atherley (1996), keterlambatan akan berdampak pada perencanaan semula serta pada masalah keuangan. Keterlambatan dalam suatu proyek konstruksi akan memperpanjang durasi proyek atau meningkatkan biaya maupun kedua-duanya. Selain itu cepatnya proses pengerjaan konstruksi juga akan berpengaruh pada mutu dan kualitas hasil bangunan serta biaya yang digunakan.

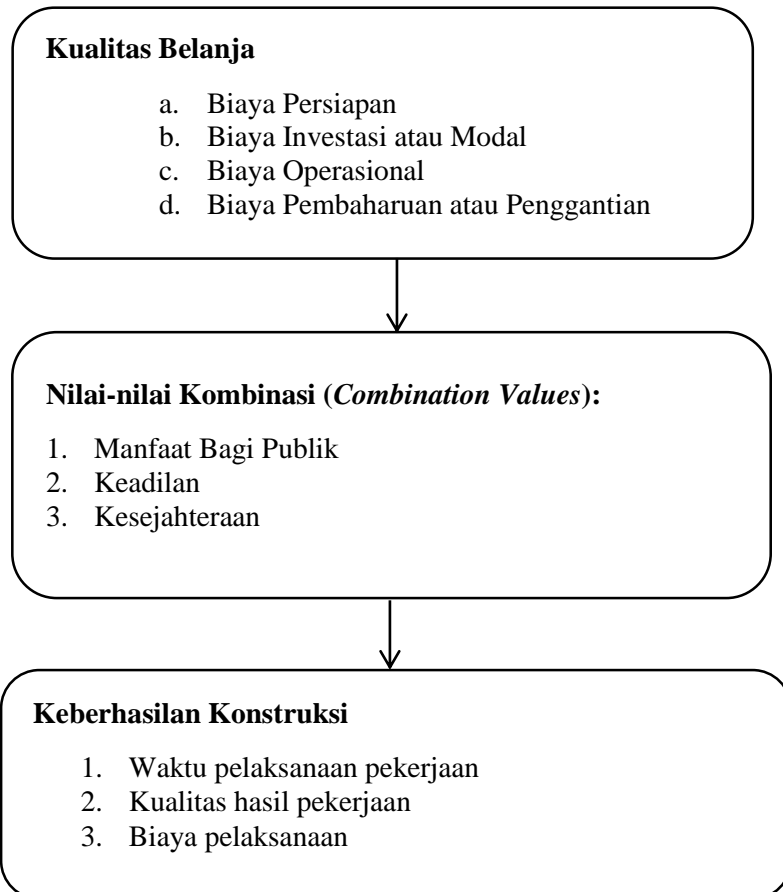
c. Mutu/ Kualitas

Mutu menurut Edward Deming dalam Surbakti (2013) adalah pemecahan masalah untuk mencapai penyempurnaan secara terus-menerus. Dalam hal ini mutu berarti sesuatu yang bersifat kontinue dan senantiasa ada perbaikan. Mutu dari proyek konstruksi harus memenuhi spesifikasi dan kriteria yang dipersyaratkan.

Ketiga sasaran tersebut erat hubungannya dan bersifat saling terkait. Artinya, jika ingin meningkatkan kinerja, produk yang telah disepakati dalam kontrak, maka umumnya harus diikuti dengan menaikkan mutu, yang selanjutnya berakibat pada naiknya biaya melebihi anggaran. Sebaliknya apabila ingin menekan biaya, maka akan menurunkan mutu, dan waktu pelaksanaannya dari segi teknis, ukuran keberhasilan proyek dikaitkan dengan jumlah sejauh mana ketiga sasaran tersebut dapat dipenuhi.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



2.4 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara tepat suatu fenomena yang akan diteliti. Definisi konseptual juga digunakan untuk menggambarkan secara abstrak tentang kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial Singarimbun (2000).

Sedangkan maksud dari definisi konseptual yaitu untuk menjelaskan mengenai pembatasan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya. Definisi konseptual dalam penelitian ini antara lain:

- a. *Cost and Benefit Analysis* (Analisis Biaya dan Manfaat) adalah metode atau cara yang digunakan dalam menganalisis biaya dan manfaat dari proyek konstruksi *fly over* Jombor, titik 0 km dan Perpustakaan Grahata secara sistematis yang meliputi biaya persiapan (modal), operasional dan pembaruan dengan mengaitkan pada efisiensi biaya serta manfaatnya bagi publik.
- b. *Public Value* yaitu nilai-nilai yang diberikan oleh pemerintah DIY melalui kontribusi yang diberikan pada publik dengan menyelenggarakan pembangunan konstruksi *fly over* Jombor, titik 0 km dan Perpustakaan Grahata sehingga memberikan kesejahteraan masyarakat.
- c. *Islamic Public Value*

Nilai publik dalam Islam didasarkan pada Al-qur'an dan As-Sunnah, dimana untuk mengetahui indikator atau nilai-nilai publik dalam Islam dapat diturunkan dari konsep negara yakni para pembuat kebijakan publik yang dalam hal ini adalah pemerintah DIY harus mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelayanan publik terkait proyek pembangunan konstruksi *fly over* Jombor, titik 0 km dan Perpustakaan Grahata dengan hasil atau *outcome* yang dirasakan oleh masyarakat.

2.5 Definisi Operasional

Untuk mengetahui dan mengukur efisiensi biaya dan hasil (*outcome*) dalam pengadaan barang jasa publik khususnya pekerjaan konstruksi, tesis ini menggunakan beberapa indikator sebagai parameter dari definisi operasional yang diambil dari kerangka teori dan definisi konsep. Indikator yang dipakai adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Efisiensi Biaya Konstruksi

	Indikator
Efisiensi Biaya	Biaya Investasi atau Modal (biaya target pekerjaan konstruksi)
	Biaya Persiapan (biaya perencanaan, pengadaan sarana dan prasarana)
	Biaya Operasional (biaya realisasi pekerjaan konstruksi, pembangunan konstruksi, penyelesaian pembangunan gedung, penataan kawasan (<i>landscape</i>))
	Biaya Pembaruan (peresmian konstruksi) atau Penggantian (efisiensi anggaran)

Tabel 2.3 Indikator Hasil (*Outcome*) Konstruksi

Nilai kombinasi (Combination Value)			
Indikator	<i>Fly over Jombor</i>	Jalan Titik 0 Km	Perpustakaan Grahatama
Manfaat Bagi Publik	Mengurangi tingkat kemacetan	Mengurangi Tingkat kemacetan	Bertambahnya jumlah khasanah arsip
	Mengurangi tingkat polusi	Mengurangi Angka Kecelakaan	Bertambahnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi
	Kefeektifan jarak tempuh	Meningkatnya kelayakan sanitasi	Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan
Kesejahteraan	Meningkatnya pendapatan UMKM	Meningkatnya pendapatan UMKM	Meningkatnya pendapatan UMKM
Keadilan	Meningkatnya aksesibilitas jalan	Semua kendaraan dapat menggunakan	Mewujudkan masyarakat yang berkarakter dan berbudaya

Tabel 2.4 Indikator Keberhasilan Konstruksi

Keberhasilan Konstruksi	Waktu pelaksanaan pekerjaan (Tepat waktu)
	Kualitas hasil pekerjaan (Flyover: Marka jalan, pagar pembatas, penerangan jalan, rambu lalu lintas); (Jalan: rambu lalulintas, marka jalan); (Perpustakaan: wifi, koleksi buku, fasilitas perpustakaan)
	Biaya Pelaksanaan (Tidak melebihi anggaran yang direncanakan)